

Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam Pengembangan Kompetensi Guru

Abdul Muid¹, Fitriyah Indah Abidah², Nur Istiyannah Hidayanti³, Tantinatus Sholihah⁴

¹Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Qomaruddin

e-mail: abdul11muid@gmail.com

dindah825@gmail.com

nuristiyannah@gmail.com

tantinatussholikhah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi guru di UPT SDN 266 Gresik. Latar belakang studi ini didasari oleh permasalahan rendahnya mutu pendidikan, yang salah satu penyebab utamanya adalah kurang optimalnya kemampuan profesional para guru. Upaya peningkatan kompetensi menjadi hal yang esensial demi memperbaiki kualitas pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi, dan dianalisis menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan kompetensi telah dijalankan melalui berbagai program seperti pelatihan, workshop, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta pelatihan berbasis daring. Sekitar 75% guru telah mengikuti pelatihan minimal satu kali dalam setahun, yang mencerminkan komitmen terhadap pengembangan diri secara berkelanjutan. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya partisipasi guru senior, keterbatasan sarana digital dan akses internet, serta beban kerja administratif yang cukup tinggi. Kepala sekolah memainkan peran strategis dalam memberikan motivasi kepada guru, meskipun efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, relevansi materi pelatihan, budaya kolaboratif melalui MGMP, serta keberlanjutan sistem monitoring. Secara keseluruhan, meskipun program peningkatan kompetensi guru di UPT SDN 266 Gresik sudah berjalan, hasilnya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dari pihak sekolah dan lembaga pendidikan untuk memperbaiki sarana pendukung, menyesuaikan konten pelatihan dengan kebutuhan riil guru, serta membangun lingkungan kerja yang mendorong pembelajaran berkesinambungan demi tercapainya pendidikan yang lebih berkualitas.

Kata kunci: *kebijakan pendidikan, kompetensi guru, pengembangan profesional, sekolah dasar, implementasi kebijakan.*

¹ Dosen Pascasarjana & S1 Universitas Qomaruddin Bungah Gresik, Dosen Pascasarjana & S1 STAI Arrosyid Surabaya, Anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik, Kabid Pendidikan Dewan Masjid Kabupaten Gresik, Pengurus Aswaja Center PCNU Kabupaten Gresik, Pengasuh Pondok Pesantren Maziyatul Ilmi Menganti Kabupaten Gresik, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon NU Driyorejo Kabupaten Gresik, Wakil Ketua MWCNU Kecamatan Menganti, Anggota Pengurus Komnasdik Kabupaten Gresik.

² Mahasiswi Universitas Qomaruddin Bungah Gresik

³ Mahasiswi Universitas Qomaruddin Bungah Gresik

⁴ Mahasiswi Universitas Qomaruddin Bungah Gresik

Abstract

This study aims to investigate the implementation of educational policy in promoting teacher competence at UPT SDN 266 Gresik. The research is driven by worries regarding the poor quality of education in Indonesia, which is partially linked to inadequate teacher competency. Enhancing teacher skills is crucial for elevating education standards, as specified in Law No. 14 of 2005 and Government Regulation No. 19 of 2017. A qualitative descriptive approach utilizing a case study method was used. Data were collected through comprehensive interviews, participatory observation, and document analysis, and analyzed using the Miles and Huberman framework. The findings suggest that the policy has been implemented via several initiatives, such as training programs, workshops, subject teacher forums (MGMP), and online courses. Around 75% of educators engage in at least one training session each year, showcasing continuous efforts to improve skills. Still, considerable challenges remain, including low involvement from senior educators, insufficient digital infrastructure and internet connectivity, along with a substantial administrative load. The school principal is vital in motivating and aiding teachers, but effective policy execution largely depends on systemic support from local authorities, ensuring training content matches real classroom requirements, fostering cooperative practices via MGMP, and establishing a strong monitoring and evaluation system. In summary, although attempts to apply teacher competence development policies at UPT SDN 266 Gresik are clear, they have not achieved maximum effectiveness. Thus, focused initiatives from both educational leaders and authorities are crucial to enhance infrastructure, tailor training to address practical needs, and foster a professional atmosphere that promotes ongoing learning in the quest for educational excellence.

Keywords : *Educational policy, teacher competence, professional development, elementary school, policy implementation.*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah fondasi utama untuk memajukan suatu bangsa. Dalam sistem pendidikan, guru memegang peranan penting dalam mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya cemerlang secara akademis, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Peran ini sangat penting karena kualitas peserta didik secara langsung berpengaruh pada peningkatan mutu sistem pendidikan nasional di Indonesia.⁵

Pendidikan adalah pilar utama untuk mendorong kemajuan sebuah negara. Dalam sistem pendidikan, pendidik memegang peran kunci dalam mengembangkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter moral yang kokoh. Peran ini sangat penting karena kualitas peserta didik berpengaruh langsung terhadap peningkatan mutu sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Situasi pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan, karena institusi pendidikan belum berhasil menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sistem pendidikan

⁵ Rohima Rambe, "Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Membaca Kitab Kuning Santri Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

nasional dianggap belum mampu membentuk identitas bangsa secara menyeluruh (Anatasya & Dewi, 2021), yang terlihat dari rendahnya nilai pada berbagai indikator kualitas pendidikan. Inti dari pendidikan seharusnya berfokus pada pembentukan karakter siswa untuk menjadi pribadi yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai. Menanggapi masalah ini, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan Nasional telah menyusun dua agenda strategis, yaitu peningkatan kualitas pendidik dan penyediaan fasilitas pembelajaran.⁶ Peningkatan kemampuan guru sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran yang maksimal bagi siswa. Sebaliknya, peningkatan sarana belajar juga merupakan faktor yang sangat penting untuk menurunkan disparitas kualitas pendidikan antara Indonesia dan negara-negara lain. Dari sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya kualitas pendidikan, guru adalah komponen utama, karena merekalah yang secara langsung menjalankan proses pembelajaran yang menentukan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan.⁷

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar, diperlukan suatu sistem manajemen sekolah yang efektif dan dapat memperbaiki serta mengembangkan kualitas secara berkelanjutan. Proses pembelajaran perlu disusun secara sistematis agar standar kualitas yang diharapkan dapat tercapai. Salah satu elemen kunci dalam peningkatan kualitas itu adalah adanya perencanaan yang sistematis dan terencana. Sebagai individu yang berinteraksi langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran, pengajar memiliki peran yang krusial dalam membentuk generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, profesionalisme pendidik menjadi faktor utama dalam menetapkan keberhasilan pendidikan. Agar pendidikan berkualitas dapat terwujud, guru harus menguasai beragam kompetensi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.⁸ Peningkatan kemampuan guru akan berpengaruh langsung pada kualitas proses pembelajaran dan mutu lulusan yang dihasilkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 10, terdapat empat keterampilan utama yang perlu dimiliki seorang guru, yakni keterampilan pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Sebaliknya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 menekankan bahwa pengembangan kemampuan guru lewat program pendidikan dan pelatihan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu tenaga pengajar.

Dalam praktiknya, para guru di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Banyak pendidik yang ditempatkan di luar bidang keahlian mereka, mengakibatkan efektivitas proses pembelajaran terganggu. Selain itu, sejumlah guru melaksanakan tugas mereka lebih sebagai kegiatan sehari-hari daripada sebagai panggilan jiwa, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap kualitas kinerja mereka.⁹ Data dari Uji Kompetensi Guru (UKG) menunjukkan bahwa kemampuan guru secara keseluruhan masih dianggap rendah. Rata-rata nasional dalam dimensi profesional dan pedagogik hanya memperoleh nilai 53,02, dan 48,94% guru belum mencapai batas kompetensi minimal, yaitu nilai 55, pada tahun 2015. Selain itu, sejumlah guru masih belum menguasai keterampilan teknologi informasi dan terus

⁶ Evi Elvira Masengi, Elvis Lumingkewas, and Brain Fransisco Supit, "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMA Negeri 2 Tondano," *Academy of Education Journal* 14, no. 2 (2023): 1084–95.

⁸ Lallo Lallo, Muh Yunus, and Elpisah Elpisah, "Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, no. 6 (2021): 6126–33.

⁹ Faridah Alawiyah, "Problematika Tata Kelola Guru Dalam Implementasi Undang-Undang Guru Dan Dosen," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 9, no. 1 (2018): 118–40.

bergantung pada metode pembelajaran konvensional, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar.¹⁰

Menurut penelitian yang dibuat oleh Dewi (2020) mengenai Pengaruh Profesionalisme dan Disiplin Guru terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar, setiap pendidik wajib menunjukkan sikap profesional dan disiplin sesuai standar yang telah ditentukan. Namun, situasi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pengajar mampu memenuhi kriteria tersebut. Masih banyak ditemui perilaku tidak disiplin, seperti datang terlambat ke sekolah dan absen saat jam kerja, menunda penyelesaian tugas yang seharusnya diselesaikan, atau bahkan pulang dari sekolah sebelum waktunya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yunus dan Rakib (2016) juga menegaskan temuan tersebut dengan menyebutkan bahwa profesionalisme guru berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pendidikan. Dalam penelitian itu, kualifikasi akademik dan kemampuan guru diidentifikasi sebagai elemen penting dalam mendukung profesionalisme, meskipun masih ada berbagai faktor pendukung serta tantangan dalam meningkatkan kualitas profesional para pendidik.

Masalah yang telah dijelaskan sebelumnya juga terlihat dalam sektor pendidikan di Kabupaten Jenepono, khususnya di SDN 88 Bontosunggu Paitana, Kecamatan Turatea. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sekolah masih sangat diperlukan, baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun dalam perbaikan fasilitas dan infrastruktur. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa termotivasi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai isu ini, dengan menitikberatkan pada Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas di Sekolah Dasar.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Gresik, UPT SD Negeri 266 Gresik memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas tenaga pendidiknya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru di lingkungan sekolah tersebut.

METODE

Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi literatur untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Menurut pendapat Jufri dan Saputra, metode ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk artikel ilmiah, buku referensi, serta materi ajar. Sampel dalam studi ini mencakup berbagai sumber yang relevan, seperti artikel jurnal, buku referensi, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Pengumpulan data dilaksanakan secara digital dengan menelusuri literatur, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan serta pengembangan kompetensi guru. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan pendekatan deduktif dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi kebijakan pendidikan guna

¹⁰ Nana Suryana et al., "Profil Kemampuan Guru Dalam Mengimplementasikan Pembelajaran Karakter Di Sekolah Dasar Negeri," *SITTAH: Journal of Primary Education* 6, no. 1 (2025): 31–44.

meningkatkan keterampilan guru di UPT SDN 266 Gresik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah dilaksanakan melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan bagi guru, workshop, kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan juga pelatihan online yang diadakan baik oleh dinas pendidikan maupun oleh sekolah secara mandiri. Data menunjukkan bahwa sekitar 75% tenaga pendidik telah mengikuti pelatihan setidaknya satu kali dalam satu tahun ajaran, yang mencerminkan adanya komitmen terhadap pengembangan kemampuan profesional secara berkelanjutan.¹¹

Meski kebijakan untuk meningkatkan kompetensi telah dilaksanakan, penerapannya di lapangan masih menemui berbagai tantangan. Pengamatan menunjukkan bahwa partisipasi guru senior dalam aktivitas pengembangan kompetensi cenderung kurang dibandingkan dengan guru-guru yang lebih muda. Selain itu, beberapa kendala teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, minimnya sarana pembelajaran digital, serta kondisi ruang kerja guru yang belum memadai merupakan faktor penghalang dalam pelaksanaan program. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah guru, tingginya beban kerja administratif juga diidentifikasi sebagai penyebab utama rendahnya keterlibatan mereka dalam kegiatan pengembangan profesional.

Ringkasan temuan lapangan disajikan dalam tabel berikut:

Aspek Penilaian	Hasil Temuan
Tingkat partisipasi guru dalam pelatihan	75% guru mengikuti pelatihan minimal 1x/tahun ajaran
Pelaksanaan MGMP dan pelatihan internal	Aktif, namun belum merata dalam partisipasi
Antusiasme guru senior terhadap pengembangan	Rendah, cenderung pasif
Hambatan implementasi	Beban administrasi, fasilitas tidak memadai
Dukungan kepala sekolah	Aktif memfasilitasi dan memotivasi guru mengikuti pelatihan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan mengenai peningkatan kompetensi guru telah diimplementasikan di UPT SDN 266 Gresik melalui berbagai program dan kegiatan. Secara administratif, ini menunjukkan bahwa pihak sekolah telah melaksanakan tugas yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, terutama dalam mengembangkan kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan karakter guru. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal dan berdampak nyata terhadap kualitas pendidikan.

Pertama, minimnya keterlibatan guru senior mencerminkan adanya persoalan dalam etos kerja serta budaya sekolah yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan diri secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Dewi (2020), yang menunjukkan bahwa aspek profesionalisme dan kedisiplinan guru sekolah dasar belum diimplementasikan secara optimal, terutama di kalangan guru yang telah lama mengajar. Kondisi ini menjadi kendala dalam membangun budaya *lifelong learning* atau pembelajaran sepanjang hayat, yang seharusnya menjadi ciri khas seorang pendidik yang profesional dan adaptif terhadap perubahan.

¹¹ Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru* (Prenada Media, 2012).

Kedua, terbatasnya fasilitas seperti akses internet, media pembelajaran digital, dan ruang kerja guru yang tidak memadai juga menghalangi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hasil ini sejalan dengan studi Anatasya dan Dewi (2021), yang menyebutkan bahwa tanpa adanya infrastruktur yang memadai, upaya peningkatan kualitas pendidikan akan berlangsung lambat dan tidak merata. Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Edward III (1980), keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat elemen utama: komunikasi, sumber daya, komitmen atau disposisi pelaksana, serta organisasi birokrasi. Dalam konteks ini, UPT SDN 266 Gresik dinilai telah berhasil menjalin komunikasi yang baik di antara para pemangku kepentingan, namun masih menghadapi tantangan terkait ketersediaan sumber daya serta lemahnya komitmen dari sebagian tenaga pengajar.

Ketiga, tingginya beban tugas administratif menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan guru dalam kegiatan peningkatan kompetensi. Banyak guru merasa terbebani oleh pekerjaan administratif yang menyita waktu, sehingga mereka kesulitan untuk mengikuti pelatihan atau program pengembangan profesional secara optimal. Situasi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang mampu mengatur manajemen waktu dan distribusi beban kerja secara lebih proporsional. Dengan demikian, kegiatan pengembangan kompetensi tidak lagi dipandang sebagai beban tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari sistem kerja guru yang profesional dan berkelanjutan.¹²

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak semata ditentukan oleh keberadaan regulasi dan program pengembangan, tetapi juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh komponen sekolah.¹³ Peran kepala sekolah menjadi sangat strategis dalam mendorong partisipasi guru terhadap peningkatan kompetensi, baik melalui pemberian motivasi maupun penerapan kebijakan internal yang mendukung pengembangan profesionalisme.¹⁴ Di UPT SDN 266 Gresik, kepala sekolah telah menunjukkan inisiatif positif dengan menyelenggarakan pelatihan internal dan membangun komunikasi terbuka bersama para guru. Namun demikian, tanpa dukungan sistematis dari pemerintah daerah—baik dalam hal pembiayaan, penyediaan sarana, maupun kebijakan yang memperkuat pengembangan sumber daya manusia—upaya yang dilakukan pihak sekolah akan tetap menghadapi berbagai kendala.

Selain itu, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan nyata para guru. Banyak program pelatihan yang telah diselenggarakan masih belum sepenuhnya mencerminkan situasi dan permasalahan yang dihadapi di lapangan, sehingga cenderung bersifat teoritis dan kurang memberikan dampak signifikan terhadap praktik mengajar. Oleh karena itu, identifikasi kebutuhan pelatihan seharusnya menjadi langkah awal dalam perancangan program peningkatan kompetensi, agar materi yang disampaikan benar-benar relevan, aplikatif, dan mampu mendorong transformasi positif dalam metode pembelajaran.¹⁵

Aspek penting lainnya yang harus diperhatikan adalah penguatan budaya kerja sama

¹² Faragina Oktaviani, "Individual Readiness to Change, Mutma'Innah Adaptive Capability, Dan Kompetensi Profesional Sebagai Strategi Penurunan Beban Kerja Pada Era Transformasi Digital" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

¹³ Claudia Wang et al., "Peran Teknologi Dalam Transformasi Pendidikan Di Indonesia," *Kemdikbud* 4, no. 2 (2023): 1–7.

¹⁴ Wang et al.

¹⁵ Firman Nugraha, *Pendidikan Dan Pelatihan: Konsep Dan Implementasi Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia* (Litbangdiklat Press, 2020).

di antara para pendidik. Dalam konteks ini, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) memiliki posisi penting sebagai tempat untuk bertukar pengalaman, melakukan refleksi secara kolektif, serta meningkatkan kemampuan guru secara terus-menerus.¹⁶ Walaupun begitu, keberhasilan pelaksanaan MGMP di tingkat sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh tingkat motivasi masing-masing guru serta seberapa besar dukungan yang diberikan oleh manajemen sekolah. Oleh karena itu, untuk memastikan MGMP dapat berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang mendukung integrasi kegiatan itu ke dalam sistem penilaian kinerja guru.

Sebagai bagian akhir, penting untuk menegaskan urgensi penguatan sistem pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan kompetensi guru. Banyak inisiatif pengembangan yang tidak mencapai hasil maksimal akibat kurangnya tindak lanjut yang sistematis dan berkelanjutan.¹⁷ Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur capaian program, tetapi juga menjadi sarana refleksi serta landasan dalam perumusan kebijakan berikutnya. Pengawasan secara rutin oleh pengawas sekolah, disertai dengan dokumentasi kinerja guru dalam kegiatan pengembangan kapasitas, dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas implementasi program. Melalui perbaikan di aspek-aspek tersebut, diharapkan kebijakan peningkatan kualitas guru tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan memberikan dampak nyata terhadap mutu pembelajaran dan mampu mencetak peserta didik yang unggul, baik dari sisi akademik maupun karakter.¹⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan peningkatan kompetensi guru di UPT SDN 266 Gresik sudah berjalan, namun belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah-langkah konkret dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan, seperti penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, penjadwalan pelatihan yang lebih fleksibel, pemberian penghargaan bagi guru berprestasi, serta pembentukan budaya kerja yang menanamkan nilai-nilai profesionalisme dan pembelajaran berkelanjutan.¹⁹ Sinergi antara kebijakan formal dan terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif merupakan kunci penting untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara holistik.

¹⁶ Roid Kamaluddin, Tri Yuni Hendrowati, and Arman Arman, "The Role of Leading Teachers in Improving the Quality of Education in Elementary Schools," *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2025): 311–19.

¹⁷ Wawan Arbeni and M Pd, "analisis hasil evaluasi dan perkembangan" *jurnal masyarakat hukum pendidikan harapan 2, no. 01 (2024)*.

¹⁸ Anjani Putri Belawati Pandiangan, *Penelitian Tindakan Kelas (Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Profesionalisme Guru Dan Kompetensi Belajar Siswa)* (Deepublish, 2020).

¹⁹ Iwan Wijaya, *Professional Teacher: Menjadi Guru Profesional* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru di UPT SDN 266 Gresik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan itu telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, workshop, MGMP, dan program pelatihan daring. Sebagian besar guru terlibat secara aktif, mencerminkan komitmen untuk terus mengembangkan kemampuan profesional. Selain itu, kepala sekolah memiliki peran krusial sebagai motivator dan penggerak yang mendukung keberlanjutan program-program tersebut.

Peningkatan kemampuan guru di UPT SDN 266 Gresik menunjukkan bahwa kebijakan itu telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, workshop, MGMP, serta pelatihan berbasis online. Mayoritas pengajar berpartisipasi secara aktif, menunjukkan dedikasi mereka dalam meningkatkan keterampilan profesional secara berkesinambungan. Selain itu, kepala sekolah berperan penting sebagai penggerak dan sumber motivasi yang juga menjamin kelangsungan berbagai program tersebut.

Walaupun begitu, pelaksanaan kebijakan ini belum menghasilkan hasil yang optimal. Masih terdapat tantangan signifikan seperti rendahnya partisipasi guru senior, kurangnya sarana pendukung, dan tingginya beban administrasi yang menghalangi guru dalam meningkatkan diri. Selain itu, ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan aktual guru dan sistem evaluasi yang tidak optimal menjadi hambatan tersendiri dalam memastikan efektivitas kebijakan. Disarankan untuk melakukan upaya yang lebih aktif dalam membangun budaya kerja yang mendukung pembelajaran berkelanjutan, terutama bagi guru senior yang membutuhkan motivasi untuk terus berkembang secara profesional. Dinas pendidikan diharapkan bisa memberikan dukungan nyata, seperti pengembangan sarana digital, penetapan anggaran yang tepat untuk pelatihan guru, serta perumusan kebijakan pengelolaan beban kerja yang lebih seimbang. Guru disarankan untuk lebih terbuka terhadap perubahan dan tetap berkomitmen pada pengembangan diri, tidak hanya untuk melaksanakan tugas administratif, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Proyek ini hanya akan berhasil jika semua elemen sekolah berkolaborasi dalam satu tujuan yang sama, yaitu membangun sistem pendidikan yang adaptif, kooperatif, dan bisa beradaptasi dengan perubahan zaman.

Guru juga disarankan untuk lebih terbuka terhadap perubahan dan tetap berkomitmen dalam pengembangan diri, tidak hanya untuk menjalankan tugas administratif, tetapi juga untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Kegiatan ini hanya akan berhasil jika setiap elemen sekolah bersinergi dalam satu visi yang sama, yaitu membangun sistem pendidikan yang adaptif, kolaboratif, dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Rohima Rambe, "Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Membaca Kitab Kuning Santri Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023).

Evi Elvira Masengi, Elvis Lumingkewas, and Brain Fransisco Supit, "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMA Negeri 2 Tondano," *Academy of Education Journal* 14, no. 2 (2023): 1084–95.

Melvin Simanjuntak et al., "implementasi peran guru upt sdn," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 01 (2025): 633–49.

Lallo Lallo, Muh Yunus, and Elpisah Elpisah, "Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, no. 6 (2021): 6126–33.

¹ Faridah Alawiyah, "Problematika Tata Kelola Guru Dalam Implementasi Undang-Undang Guru Dan Dosen," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 9, no. 1 (2018): 118–40.

Bahrudin, S. A., In'am, A., & Lendriyono, F. (2020). *Analisis hasil Uji Kompetensi Guru tahun 2015 di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 7(1)

Nafisa, I. A., Rizki, A., Febriyanti, A., Anggraeni, E. F., Kurniadevi, A., & Sholikhah, E. (2023). *Implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Kulon Progo*. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 17(1), 728–749.

Anatasya, & Dewi. (2021). *[Judul riset tentang sistem pendidikan dan identitas bangsa]*.

Rahimah, R. (2022). *Peningkatan kemampuan guru SMP Negeri 10 Kota Tebing Tinggi dalam menyusun modul ajar Kurikulum Merdeka*. *ANSIRU PAI*, 6(1), 92–106.

Ramaila, S., & Molwele, A. J. (2022). *The role of technology integration in 21st century skills development in life sciences teaching*. *International Journal of Higher Education*, 11(5), 9–17.

Widayati, W., Utami, S., Tobing, V., & Muhajir, M. (2022). *Pelatihan pembuatan modul ajar Kurikulum Merdeka bagi guru Paud*. *Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 5(4), 195–200.

Helmi, & Jamali. (2024). *Peningkatan kemampuan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka melalui kegiatan MGMP di MAN 3 Aceh Timur*. *Jurnal Aktual Pendidikan Indonesia*, 3(1), 17–24.

Handayani, S., Hilmy, P., Annisya, A., Prasastianta, D. E., Amalina, E. N., & Kurniawan, R. A. (2023). *Reintegrasi MGMP dan peningkatan kompetensi guru dalam merancang evaluasi pembelajaran SMART di era Merdeka Belajar*. *Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 9(1).